

PERAN SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN BERBASIS AKRUAL

Oleh:

Khoirun Nisa Pulungan^{1*)}, Ahmad Ramadhan²⁾

^{1,2} UIN Syekh Ali Hasan Addari Padangsidimpuan

¹email: kisarankhaitunisa@gmail.com

²email: ahmadramadhan@uinsyahada.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Submit, 9 November 2025

Diterima, 13 Desember 2025

Publish, 30 Desember 2025

Kata Kunci:

Standar Akuntansi Pemerintahan,
Basis Akrual,
Sumber Daya Manusia,
Teknologi Informasi.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan keterampilan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI) dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di era reformasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik observasi pustaka untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkaji literatur yang relevan. Dengan semakin tingginya tuntutan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah, pelaporan keuangan yang akurat dan transparan menjadi suatu keharusan, dan penggunaan basis akrual menjadi penting. Untuk mencapai hasil keuangan yang lebih akurat dan efisien, diperlukan penggunaan TI yang efektif dan tenaga kerja manusia yang berkualitas tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan, kecakapan teknis, kinerja akademik, dan pengalaman kerja semuanya sangat penting untuk meningkatkan kompetensi SDM. Komponen kunci yang membantu mengoptimalkan penggunaan TI dalam SAP berbasis akrual adalah ketersediaan perangkat lunak, perangkat keras, dan konektivitas internet.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



1. PENDAHULUAN

Akuntansi berbasis akrual merupakan metode pencatatan yang menyesuaikan transaksi berdasarkan waktu terjadinya aliran sumber daya, bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan pendekatan ini, setiap transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan dilaporkan dalam laporan keuangan secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan, karena mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya tanpa bergantung pada waktu penerimaan atau pembayaran kas. Akuntansi berbasis akrual juga memberikan gambaran yang lebih transparan tentang kinerja keuangan suatu entitas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dengan diterapkannya basis akrual dalam akuntansi pemerintahan daerah Padangsidimpuan

diharapkan kinerja instansi pemerintah dalam penyusunan dan realisasi anggaran dapat semakin baik. Basis akrual memungkinkan pencatatan transaksi secara lebih akurat karena mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga perencanaan anggaran menjadi lebih realistis dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah daerah Padangsidimpuan.

Keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, salah satunya adalah ketersediaan sumber daya manusia

yang berkompeten. Aparatur yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi berbasis akrual akan mampu mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan pemerintah dengan lebih akurat dan transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencatatan serta pengolahan data keuangan. Sistem yang terintegrasi dan berbasis digital akan membantu dalam meminimalkan kesalahan, mempercepat proses pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oleh karena itu, kombinasi antara kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan sangat menentukan keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual dalam pemerintahan.

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang sangat berharga, karena kualitas dan kinerjanya berperan penting dalam menentukan kesuksesan organisasi tersebut. Jika suatu organisasi mampu mendukung pengembangan karir pegawai dengan menilai dan mengoptimalkan kemampuannya, maka pegawai akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal. Pengembangan kompetensi melalui orientasi berbasis keterampilan dan keahlian yang relevan akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, terutama dalam instansi pemerintah. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, kinerja instansi dapat lebih optimal, sehingga pelayanan yang diberikan semakin efektif dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat secara lebih baik.

Selain faktor sumber daya manusia, keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan kualitas informasi dalam laporan keuangan instansi pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi berperan sebagai alat untuk menyajikan data yang akurat, relevan, efektif, dan efisien, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan individu, perusahaan, maupun pemerintah dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan sistem berbasis komputer, proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat, sementara jaringan yang terhubung antar perangkat memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar instansi. Selain itu, pemanfaatan teknologi telekomunikasi juga memastikan bahwa informasi dapat disebarluaskan dan diakses dalam skala global, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah dapat semakin meningkat.

Teknologi informasi memiliki peran penting dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, terutama dalam mengelola jumlah transaksi yang besar. Jika pencatatan transaksi dilakukan secara manual, risiko terjadinya

kesalahan pencatatan akan semakin tinggi, yang dapat berdampak pada akurasi dan keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat akan membantu pemerintah dalam memproses transaksi keuangan secara lebih efektif dan efisien. Dengan sistem yang terkomputerisasi, pencatatan dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi kesalahan, serta mempercepat penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Penerapan basis akrual dalam suatu organisasi, khususnya dalam sektor pemerintahan, hanya dapat berjalan dengan optimal apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Kompetensi mencerminkan kapasitas dan keahlian seseorang dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara efektif. Jika pegawai tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka kinerja optimal dalam pekerjaannya akan sulit dicapai. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan sistem akuntansi berbasis akrual dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pencatatan keuangan serta menghambat upaya reformasi dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi instansi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan agar reformasi akuntansi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, serta akuntabel. Dengan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, efisiensi dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat meningkat, sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh pemahaman dasar serta latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dengan kompetensi yang memadai, mereka mampu menyajikan laporan keuangan secara efektif dan efisien, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, semakin besar pula rasa tanggung jawab serta kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pegawai yang kompeten juga dapat beradaptasi dengan perubahan serta berkontribusi dalam menciptakan sistem kerja yang lebih optimal dan transparan, termasuk diantara kemampuan sumber daya manusia untuk menerapkan pengetahuan keterampilan termasuk dalam kondisi yang baru.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi tidak hanya mencakup perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data, tetapi juga berperan dalam mendistribusikan

informasi secara efektif. Dalam konteks akuntansi, teknologi informasi berfungsi untuk memastikan bahwa data keuangan dapat diakses, dikelola, dan dilaporkan dengan lebih akurat dan efisien. Pemanfaatannya dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi dalam berbagai tugas akuntansi, seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta analisis data untuk pengambilan keputusan. Dengan sistem yang terintegrasi, teknologi informasi membantu meningkatkan transparansi, mengurangi risiko kesalahan, dan mempercepat proses pelaporan, sehingga mendukung penerapan standar akuntansi yang lebih baik dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan.

Teknologi informasi memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan data dan sistem akuntansi, termasuk mempercepat proses transaksi, meningkatkan akurasi dalam penghitungan, serta memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar. Dengan dukungan teknologi, proses pencatatan dan pengolahan transaksi dapat dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan kemampuan multiprocessing, di mana beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan, mempercepat analisis dan pelaporan keuangan. Dengan berbagai manfaat tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Padangsidempuan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama bagi pemerintah daerah seperti Padangsidempuan. SAP sendiri merupakan pedoman atau aturan yang digunakan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah, sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat terjamin. Bambang Suharno (2025) seorang pakar akuntansi pemerintahan, SAP adalah landasan utama bagi pemerintah dalam mengelola keuangan dengan baik. "Dengan menerapkan SAP, pemerintah dapat lebih mudah dalam memantau arus keuangan dan mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan publik," ujarnya.

Di Kota Padangsidempuan, penerapan SAP telah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menyebutkan bahwa "transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah harus diutamakan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas." Namun, meskipun penting, masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menerapkan SAP dengan baik.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya SAP dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Sebagai contoh, dalam laporan audit BPK tahun 2020, terdapat beberapa pemerintah daerah yang masih memiliki catatan buruk terkait dengan pengelolaan keuangan yang tidak transparan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan *literature review* (tinjauan literatur). *Literature review* merupakan suatu studi yang bertujuan untuk merangkum dan mensintesis penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan suatu topik tertentu. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber akademik, seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta mengidentifikasi tren, kesenjangan penelitian, atau temuan-temuan yang *relevan*. Dengan menggunakan metode ini, artikel dapat disusun berdasarkan informasi yang sudah ada, sehingga menghasilkan kajian yang lebih sistematis, valid, dan mendukung pemahaman mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian *literature review* mencakup ulasan, rangkuman, serta pemikiran penulis berdasarkan peninjauan berbagai dokumen, baik dari sumber internasional maupun nasional. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa publikasi akademis, publikasi pemerintah, undang-undang dan peraturan, jurnal ilmiah, buku, media berita, serta berbagai catatan lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menyajikan analisis yang komprehensif terhadap perkembangan konsep, temuan, serta tren yang ada dalam bidang tertentu. Selain itu, *literature review* juga membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung argumentasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu isu.

Pencarian literatur dalam penelitian ini melalui dengan memilih artikel dari database elektronik bereputasi seperti Google Scholar, Garuda Rujukan Digital (Garuda Ristekbrin), dan situs resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan menggunakan kata kunci "Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Padangsidempuan", "Kopentensi Sumber Daya Manusia", dan "Pemanfaatan Teknologi Informasi". Penelusuran tersebut menemukan beberapa artikel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan Menggunakan Basis Akrual

Sebagai langkah awal dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dibentuklah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang bertanggung jawab dalam merancang Peraturan Pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). KSAP mulai melakukan kajian, penelitian, serta penyusunan draf standar akuntansi pemerintahan sejak tahun 2006. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengatur penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah pusat, yang mulai diimplementasikan pada tahun 2009. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sejak saat itu pemerintah pusat mulai menyajikan informasi akrual mengenai pendapatan dan pengeluaran sebagai pelengkap laporan Realisasi Anggaran berbasis kas. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, SAP berbasis akrual diwajibkan untuk diterapkan secara penuh paling lambat tahun 2015. Kebijakan ini menggantikan sistem SAP berbasis kas menuju akrual yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sehingga mendorong perbaikan dalam sistem akuntansi pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tantangan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan perlu terus ditingkatkan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menghadirkan tantangan tersendiri karena dinilai lebih kompleks dibandingkan dengan sistem berbasis kas. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi SAP berbasis akrual meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta perubahan budaya kerja yang membutuhkan waktu dalam proses adaptasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti peningkatan pelatihan bagi aparatur pemerintah, penguatan sistem informasi akuntansi, serta dukungan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. BPK (2015) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 109 pemerintah daerah di Indonesia, ditemukan beberapa permasalahan utama yang menghambat implementasi sistem ini. Salah satu tantangan terbesar adalah kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung, seperti regulasi yang masih perlu disempurnakan dan kurangnya pedoman teknis yang jelas dalam penerapan akuntansi akrual. Selain

itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala, di mana banyak aparatur pemerintah belum memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami dan mengoperasikan sistem akuntansi berbasis akrual. Tantangan lainnya adalah infrastruktur teknologi informasi yang masih belum optimal, termasuk sistem yang belum terintegrasi dengan baik dan keterbatasan dukungan teknis dalam pengelolaan data akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan pemerintah daerah, seperti penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih modern dan terintegrasi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual

Sumber daya manusia dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merujuk pada pegawai publik yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Kompetensi dan pemahaman mereka terhadap sistem akuntansi berbasis akrual menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem ini. Namun, hasil pemeriksaan terhadap 109 pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi aparatur masih menjadi tantangan utama. Banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami konsep akuntansi berbasis akrual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, minimnya pelatihan dan pendampingan teknis juga memperlambat proses adaptasi terhadap sistem baru ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang intensif, sertifikasi keahlian, serta pendampingan yang berkelanjutan guna memastikan kualitas laporan keuangan daerah yang lebih akurat dan transparan. Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat bergantung pada tingkat kompetensi sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas hanya dapat disusun oleh SDM yang terampil dan memahami peraturan penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Perubahan basis akuntansi ke SAP berbasis akrual membutuhkan dukungan penuh dari para pimpinan instansi, termasuk dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang memadai bagi para pegawai atau aparatur. Namun, pada tahap awal peralihan, pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia belum dilakukan secara optimal dan masih jauh dari memadai. Hal ini mengakibatkan keterbatasan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual secara efektif.

Hambatan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan SAP Berbasis Akrual

Permasalahan sumber daya manusia dalam penerapan SAP berbasis akrual juga muncul akibat

tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan pegawai di bagian keuangan, yang banyak di antaranya tidak berasal dari bidang akuntansi. Latar belakang pendidikan akuntansi sangat penting karena pegawai yang memiliki pendidikan dan pelatihan intensif, pengalaman kerja di bidang keuangan, serta pemahaman mendalam tentang sistem akuntansi akan lebih mudah memahami logika akuntansi. Sebaliknya, pegawai yang kesulitan memahami konsep akuntansi berisiko melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan yang lebih terarah menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penempatan pegawai akuntansi tanpa mempertimbangkan kompetensi dan pemahaman mereka terhadap akuntansi akrual dapat berdampak negatif pada kualitas pengelolaan keuangan.

Hal ini menyebabkan posisi di bidang keuangan diisi oleh sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, serta kurangnya akurasi dalam pelaporan keuangan. Akibatnya, proses audit dan pengambilan keputusan keuangan menjadi kurang efektif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan suatu organisasi. Oleh karena itu, penting bagi instansi atau perusahaan untuk memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan di bidang akuntansi memiliki kompetensi yang sesuai agar sistem keuangan dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan juga pentingnya pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan masa kerja menjadi bukti bahwa faktor-faktor tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Meskipun penggunaan software akuntansi dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP berbasis akrual, akurasi dan keandalan data tetap bergantung pada proses input yang dilakukan. Jika data dimasukkan secara tidak tepat, kesalahan dalam laporan keuangan tetap bisa terjadi. Keberadaan sumber daya manusia yang berkompeten tetap menjadi faktor krusial dalam memastikan penerapan SAP berbasis akrual berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual

Teknologi informasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penggunaan sistem dan software

akuntansi yang canggih dapat membantu dalam pencatatan, pengolahan, serta penyajian laporan keuangan secara lebih akurat dan efisien. Dengan dukungan teknologi yang memadai, proses pelaporan dapat dilakukan secara real-time, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun, efektivitas teknologi informasi dalam penerapan SAP berbasis akrual tetap bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Dibandingkan dengan SAP berbasis kas, penerapan SAP berbasis akrual memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dari segi implementasi, waktu pencatatan, dan ruang lingkup. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mencatat transaksi secara lebih rinci, termasuk pengakuan aset, kewajiban, dan beban yang belum direalisasikan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek, seperti proses pencatatan, pengolahan data, penyajian laporan, serta analisis keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi dan otomatisasi yang tepat, potensi kesalahan dapat diminimalkan, waktu pemrosesan menjadi lebih cepat, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat lebih terjaga.

Kualitas teknologi informasi dalam penerapan SAP berbasis akrual tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem yang digunakan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Pengguna yang memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi dan prinsip akuntansi akrual akan mampu memanfaatkan sistem secara optimal, memastikan data yang dimasukkan akurat, serta menginterpretasikan laporan keuangan dengan benar. Sebaliknya, jika pengguna tidak memiliki kompetensi yang memadai, risiko kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data tetap tinggi, meskipun teknologi yang digunakan sudah canggih.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual sangat bergantung pada optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia. Penggunaan sistem yang canggih akan memberikan hasil yang maksimal jika dioperasikan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini hanya dapat dicapai apabila pegawai yang bertanggung jawab dalam pengoperasian sistem memiliki kompetensi serta pengetahuan yang memadai dalam menggunakan aplikasi akuntansi. Dengan keterampilan yang tepat, mereka dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat, proses pencatatan berjalan efisien, serta laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi akuntansi akrual berbasis teknologi informasi.

4. KESIMPULAN

Sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan penggunaan teknologi yang optimal adalah kunci keberhasilan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kajian telah menunjukkan bahwa unsur-unsur seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, penempatan sesuai latar belakang pendidikan, masa kerja, dan tersedianya perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang mampu memecahkan langsung dengan tingkat kompetensi SDM. Namun, Studi menunjukkan bahwa masih ada beberapa pemerintah daerah yang belum memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada staf pemerintah secara optimal. Selain itu, beberapa instansi pemerintah masih menghadapi kendala dalam pemanfaatan informasi teknologi, seperti keterbatasan jaringan internet dan pemahaman pengguna tentang perangkat lunak yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, pegawai harus diberi pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan perangkat lunak yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara berkesinambungan dalam penerapan SAP berbasis akrual dengan memastikan penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai, serta pelatihan dan bimbingan teknis yang optimal. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode perhitungan statistik untuk lebih meningkatkan keakuratan data untuk mengukur seberapa penting pemanfaatan informasi teknologi dan kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan SAP berbasis akrual. Peneliti juga diharapkan dapat memperdalam penelitian mereka dengan menambahkan variabel tambahan seperti: ukuran satuan kerja, motivasi, budaya organisasi, dan resistensi terhadap perubahan.

Hambatan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Penerapan SAP Berbasis Akrual

Beberapa Pemerintah Daerah telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam bidang teknologi informasi dan pemanfaatannya, sebagaimana dibuktikan dalam berbagai studi yang telah dilakukan. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi yang masih belum memadai. Kualitas infrastruktur yang rendah

menghambat optimalisasi teknologi dalam mendukung akuntansi pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi masih belum dilakukan secara maksimal, baik dalam hal penggunaan maupun integrasi dengan sistem yang ada. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan teknologi informasi, sehingga proses penerapannya menjadi tidak optimal dan terkesan mahal. Akibatnya, manfaat dari penggunaan teknologi informasi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual belum dapat dirasakan secara maksimal dalam waktu dekat.

Salah satu hambatan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi-instansi pemerintahan adalah keterbatasan dalam sistem akuntansi dan teknologi informasi. Hingga saat ini, belum tersedia sistem teknologi informasi dan sistem akuntansi yang sepenuhnya dapat menunjang ketentuan-ketentuan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Keterbatasan ini mencakup kurangnya integrasi sistem, ketidaksesuaian fitur dengan kebutuhan akuntansi pemerintah, serta minimnya dukungan infrastruktur teknologi yang andal. Akibatnya, proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan masih menghadapi berbagai kendala, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi standar akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan. Tantangan lainnya dalam aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada saat peralihan basis akuntansi akrual adalah ketersediaan akses internet yang mumpuni. Dimana koneksi internet belum tersedia.

Tantangan lainnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada saat peralihan basis akuntansi akrual adalah ketersediaan akses internet yang memadai. Koneksi internet yang belum tersedia dapat diatasi dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang memadai, sehingga pegawai terbiasa dalam menggunakan software akuntansi penunjang SAP berbasis akrual. Dengan demikian, kendala teknis dapat diminimalkan, dan proses implementasi akuntansi berbasis akrual dapat berjalan lebih efektif.

5. REFERENSI

- Alfian, M. (2015). Faktor pendukung implemetasi simda dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada skpd kabupaten kulon progo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(3), 119-131.
- Andiola, L. M., Bedard, J. C., & Hux, C. T. (2017). Writing a literature review in behavioural accounting research. *The Routledge Companion to Behavioural Accounting Research*, 473-485.
- Andhayani, A. (2017). Dilema akrualisasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 291-307.

- Armeli, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ayem, S., & Saputri, N. F. (2018). Komunikasi Organisasi Vertikal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Teknologi Informasi Pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kul. Jurnal Akuntansi, 6(2), 165–179.
- Dewi, L. K. U., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Keberhasilan Penerapan Sap Berbasis Akrua (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Badung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Erawati, T., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrua: kajian dari aspek keperilaku. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 313-332.
- Hastutik, P., & Riduwan, A. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Akuntansi Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(7).
- Indrawati, L. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Satuan Kerja Politeknik Negeri Bandung. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 10(1), 1-11.
- Mayani, N., Falehan, A. F., & Wahyuni, E. S. (2018). Strategi Peningkatan Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1).
- Permana, I. B. G. B., & Wiratmaja, I. D. N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2260-2287.
- Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2019). Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi, dan pemahaman basis akrua terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Saprudin, S. (2017). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 59-69.
- Syafitri, R. A. D. (2022). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kepatuhan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98.
- Widianti, H., Hadiyati, S. N., & Sulistyowati, D. (2016, May). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntansi akrua pada sektor pemerintah. In *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK* (Vol. 1, No. 1).
- Yanni, Y., Randa, F., & Bangun, Y. K. (2020). PEMAKNAAN PENERAPAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL. *Ajar*, 3(01), 48-67.
- Yuhertiana, I. (2015). BEHAVIOURAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING RESEARCH IN INDONESIA: A LITERATURE REVIEW. *Malaysian Accounting Review*, 14(1).